



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 209/Pdt.G/2013/PA.Pyk
putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota,

Sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, dahulu tempat tinggal di Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di dalam/di luar Wilayah RI,

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 02 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 02 Mei 2013 dengan Nomor 209/Pdt.G/2013/PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Maret 2011 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Luhak tanggal 17 Maret 2011;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak yang bunyinya seperti yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;

Hlm 1 dari 11 hm Pts No 209/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Haro Utara sampai berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan dan belum pernah terjadi perceraian.
5. Bahwa, usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah lebih kurang 2 tahun 2 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri hanya 5 hari, selama bergaul 5 hari tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja;
6. Bahwa, pada tanggal 22 Maret 2011 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Pulau Mudo Riau dan berjanji akan pulang waktu lebaran 2011, tapi semenjak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak ada pula mengirimkan berita tentang keadaannya dan keberadaannya, maka semenjak saat itu sampai sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 2 tahun 2 bulan lamanya dan sekarang Penggugat tidak lagi dimana tempat tinggal Tergugat yang pasti ;
7. Bahwa, semenjak pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak mempedulikan Penggugat lagi ;
8. Bahwa, sekarang Penggugat tidak sabar dan tidak redha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut, karena Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh Rp.10.000,- untuk mentanfizkan sighat taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat dahulu ;
9. Bahwa, Penggugat ada melampirkan surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh, Wali Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang No.64/WN-STP/IV/2013, tanggal 30 April 2013;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan talak satu khul'i shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad sebesar Rp 10.000. (sepuluh ribu rupiah);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil melalui mass media sebanyak dua kali sesuai relas panggilan Nomor 209/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 13 Mei 2013 dan tanggal 13 Juni 2013 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Luhak pada tanggal 17 Maret 2011 telah di-*nazagelen* dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis, ternyata cocok (P1);



2. Surat Keterangan Ghaiib Nomor Sikabu-kabuTanjung Haro Padang Panjang tanggal 30 April 2013 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari/Lurah telah bermeterai secukupnya (P2);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 10 tahun yang lalu dan tidak hadir pada waktu keduanya menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya kedua pihak rukun dan harmonis, namun semenjak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi melihat sendiri sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dirumahnya tinggal tanpa suami/Tergugat dan dimana tempat tinggal Tergugat saat ini saksi juga tidak mengetahui karena tidak dikenal / gaib;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada mempedulikan Penggugat sama sekali;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota adalah tetangga Pnggugat dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Pengugat masih kecil dan kenal dengan Tergugat sejak Penggugat nikah dengan Tergugat pada tahun 2011;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat nikah dengan Tergugat dan mendengar Tergugat mengucapkan shighat taklik talak seperti yang tercantum dalam surat nikah Penggugat;



• Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) hari dan sesudah itu Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tak pernah kembali;

putusan Pengadilan Agama

- Bahwa hingga sekarang Tergugat meninggalkan kediaman bersama 2 tahun lamanya dan alatnya tidak dikenal;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada penggugat dan tidak ada mempedulikan Penggugat sama sekali;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 27 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm 5 dari 11 hm Pts No 209/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perdamaian dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga hanya 5 (lima) hari setelah menikah, kemudian Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Pulau Mudo Riau dan berjanji akan pulang waktu lebaran 2011, ternyata sejak itu sampai sekarang telah 2 tahun 2 bulan lamanya tidak pernah kembali
2. Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan selama itu pula tidak ada mempedulikan Penggugat lagi;
3. Bahwa Penggugat tidak redha atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dan bersedia membayar iadh /pengganti kepada Tergugat sebesar Rp.10.000,-
4. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak dikenal/gaib;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P1.P2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P1) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg,. oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) juga terbukti Tergugat sesudah aqad nikah mengucapkan shighat taklik talak sebagai berikut:

“ Sewaktu-waktu saya:

- (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

(3) Atau saya menyakit badan/atau jasmani isteri saya.

(4) Atau membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya; Kemudian isteri saya tidak redha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak satu kepadanya.

Menimbang, bahwa bukti (P2) merupakan akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) harus dinyatakan terbukti bahwa dalil Penggugat tentang Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah nikah pada tanggal 17 Maret 2011;
2. Bahwa Tergugat sesudah aqad nikah mengucapkan shighat taklik talak seperti yang tercantum dalam buku nikah Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 2 tahun lamanya ;

Hlm 7 dari 11 hm Pts No 209/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa selama bernisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan selama itu pula tidak ada mempedulikan Penggugat;

5. Bahwa Penggugat tidak redha atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dan bersedia membayar iadh /pengganti kepada Tergugat sebesar Rp.10.000,-
6. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak dikenal/gaib;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak.....disebabkan
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama/sejak
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak berhasil/tidak ada usaha damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**اليها لتسكنوا ازواجاً انفسكم من لكم خلق ان ايته ومن
ورحمة مودة بينكم وجعل**

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan tersebut di atas, dalam hal ini kepada KUA Kecamatan.....Kabupaten.....untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hlm 9 dari 11 hm Pts No 209/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Luak, Kabupaten Lima puluh Kota;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 23 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1434 H, oleh Dra. Hj. SARWATI RUSLI, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan ARIDLIN, SH, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 209/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 03 Mei 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1434 H dengan dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan ARIDLIN, SH, Hakim-hakim Anggota serta YUSKAL EFENDI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS



Dra. FIRDAWATI

ARIDLIN, SH

PANITERA PENGGANTI

YUSKAL EFENDI, SH

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp (dh). |